

**PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, PENERAPAN
SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH (SAKD) DAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN TERHADAP KUALITAS LAPORAN
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi Empiris
Pada SKPD Kabupaten Indragiri Hulu)**

Oleh :

Abdul Hakim

Pembimbing : Kirmizi dan Sem Paulus

Faculty of Economic, Riau University, Pekanbaru, Indonesia

Email : abdulhakim9395@gmail.com

*The Influence of Human Resources Competence, Implementation of Regional
Financial Accounting System and The Internal Control System on
The Quality of Local Government Financial Report
(Empirical Study on SKPD of Indragiri Hulu Regency)*

ABSTRACT

The purpose of this study was to test the Influence of Human Resources Competence, Implementation of Regional Financial Accounting System and the Internal Control System on the Quality of Local Government Financial Report. The population in this study is the manager of the work unit or financial officers in the regional work units Indragiri Hulu that amounts 29 SKPD. The samples were selected by purposive sampling method. The data used in this research is primary data. Data collection method used is the method of documentation. The analytical method used in this research is multiple linear regression analysis. Based on the data collected and testing has been done on the problem by using the method of regression analysis, it can be concluded: 1) Competence Human Resources affects the Quality of Local Government Financial Report. That is, the better the Competence of Human Resources, it will improve the Quality of Local Government Financial Report. 2) Implementation Regional Financial Accounting System affects the Quality of Local Government Financial Report. That is, the better the Regional Financial Accounting System Implementation, will improve the Quality of Local Government Financial Report. 3) Government Internal Control System affects the Quality of Local Government Financial Report. That is, the better the Internal Control System run by the Government, will improve the Quality of Local Government Financial Report.

Keywords: Competence of Human Resources, Implementation of Regional Financial Accounting System, Internal Control System and Quality of Financial Statements

PENDAHULUAN

Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia (BPK RI)

kembali memberikan opini Wajar
Dengan Pengecualian (WDP) atas
LKPD Kabupaten Indragiri Hulu TA
2013. Opini ini sama dengan opini

yang diberikan BPK RI atas LKPD Kabupaten Indragiri Hulu pada tahun – tahun sebelumnya.

Menurut pendapat BPK, kecuali untuk dampak atas penyajian saldo Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah Daerah, saldo aset tetap, saldo aset lainnya, dalam semua hal yang material, untuk posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu per 31 Desember 2013, dan realisasi anggaran, serta arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut laporan keuangan telah menyajikan secara wajar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia memberikan Opini Wajar Dengan Pengecualian atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun Anggaran 2014.

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan, yaitu: (1) Penyertaan modal di 3 (tiga) BUMD tidak berdasarkan Perda dan nilai investasi permanen pada PDAM Tirta Indra tidak dapat diyakini kewajarannya. Penemuan kelemahan sistem pengendalian intern ini menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan kurang Andal, karena informasi yang ada harus disajikan dengan jujur, dapat diuji kebenarannya dan netral; (2) Pernyataan modal kepada PD Indragiri berupa aset tidak dapat diyakini kewajarannya, pengembalian 13 (tiga belas) aset kepada Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu belum berdasarkan BAST dan biaya operasional PD Indragiri membebani APBD TA 2014. Penemuan kelemahan sistem pengendalian intern ini menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan kurang Andal,

karena informasi yang ada harus disajikan dengan jujur, dapat diuji kebenarannya dan netral; (3) Pengelolaan aset tetap Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu TA 2014 belum optimal. Penemuan kelemahan sistem pengendalian intern ini menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan kurang Relevan, karena informasi yang ada tidak memiliki manfaat prediktif dan tidak lengkap; dan (4) dan Pengelolaan aset lain-lain belum optimal. Penemuan kelemahan sistem pengendalian intern ini menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan kurang Dapat Dipahami, karena informasi yang ada harus dapat dipahami dan dinyatakan dalam bentuk atau istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

BPK juga menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan negara, yaitu: (1) Pemberian tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, pertimbangan objektif lainnya, prestasi kerja tidak berdasarkan kriteria yang terukur. Penemuan ketidakpatuhan ini menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan tidak Dapat Dibandingkan, karena informasi yang disajikan tidak dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau entitas lainnya akibat penilaian tidak berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan; (2) Pertanggungjawaban biaya tiket pesawat tidak sesuai dengan harga sebenarnya, biaya perjalanan dinas melebihi tarif, indikasi perjalanan dinas tidak dilaksanakan, serta realisasi perjalanan dinas belum dipertanggungjawabkan. Penemuan ketidakpatuhan ini menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan

kurang Andal, karena informasi yang ada harus disajikan dengan jujur, dapat diuji kebenarannya dan netral; (3) Terdapat kelebihan pembayaran pada 4 (empat) paket pekerjaan di Dinas Pekerjaan Umum dan Jaminan Pemeliharaan belum dicairkan. Penemuan ketidakpatuhan ini menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan kurang Andal, karena informasi yang ada harus disajikan dengan jujur, dapat diuji kebenarannya dan netral; dan (4) Terdapat kelebihan pembayaran pada paket pekerjaan pembangunan SDN 007 Sekip Hulu (tahap I) dan tanggung jawab pemeliharaan yang belum dilaksanakan. Penemuan ketidakpatuhan ini menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan kurang Andal, karena informasi yang ada harus disajikan dengan jujur, dapat diuji kebenarannya dan netral.

Menurut Devi (2011), laporan keuangan merupakan sebuah produk yang dihasilkan oleh bidang atau disiplin ilmu akuntansi. Untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkompetensi, maka Kompetensi Sumber Daya Manusia yang melaksanakan sistem akuntansi sangatlah penting. Begitu juga di entitas pemerintahan, untuk menghasilkan Laporan Keuangan Daerah yang berkompetensi dibutuhkan SDM yang memahami dan kompeten dalam Akuntansi pemerintahan, keuangan daerah bahkan organisasional tentang pemerintahan.

Penelitian mengenai pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas LKPD telah dilakukan oleh Indriasari dan Nahartyo (2008) dan Zuliarti (2012). Indriasari dan Nahartyo (2008) membuktikan bahwa terdapat pengaruh signifikan positif

kompetensi sumber daya manusia dengan kualitas LKPD. Sedangkan Zuliarti (2012) meneliti bahwa sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas LKPD. Ketidak konsistenan hasil penelitian ini menyebabkan peran variabel kompetensi sumber daya manusia perlu diteliti kembali.

Hal kedua yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berdasarkan standar akuntansi pemerintahan adalah bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan keandalan pengelola keuangan pemerintah melalui penyusunan dan pengembangan standar akuntansi pemerintah.

Penelitian mengenai pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap kualitas LKPD telah dilakukan oleh Nurillah (2014) dan Ihsanti (2014). Nurillah (2014) membuktikan bahwa terdapat pengaruh signifikan positif Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dengan kualitas LKPD. Sedangkan Ihsanti (2014) meneliti bahwa Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah tidak berpengaruh terhadap kualitas LKPD. Artinya, terdapat perbedaan hasil penelitian yang melandasi dilakukannya penelitian kembali tentang Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap kualitas LKPD.

Hal terakhir yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah Sistem Pengendalian Intern pemerintah itu sendiri. Pada Tahun 2008, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Didalam Konsep Standar Pemeriksaan Keuangan Negara tentang Standar Pekerjaan Lapangan Pemeriksaan Keuangan mengenai Pengendalian Intern disebutkan bahwa sistem informasi yang relevan dengan tujuan laporan keuangan, salah satunya adalah sistem akuntansi yang terdiri dari metode dan catatan yang dibangun untuk mencatat, mengolah, mengikhtisarkan dan melaporkan transaksi entitas (baik peristiwa maupun kondisi) untuk memelihara akuntabilitas bagi aktiva, utang dan ekuitas yang bersangkutan (BPK RI, 2006). Sistem akuntansi berkembang sangat pesat sehingga sebagai suatu informasi, membutuhkan manusia untuk menjalankan sistem yang ada untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

Penelitian mengenai pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap kualitas LKPD telah dilakukan oleh Sudiaranti, dkk (2015) dan Yensi (2014). Sudiaranti, dkk (2015) membuktikan bahwa terdapat pengaruh signifikan positif Sistem Pengendalian Intern terhadap kualitas LKPD. Sedangkan Yensi (2014) meneliti bahwa Sistem Pengendalian Intern tidak berpengaruh terhadap kualitas LKPD. Ketidak konsistenan hasil penelitian ini menyebabkan peran variabel SPI perlu diteliti kembali.

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, maka rumusan masalah penelitian ini adalah: Apakah *Intellectual Capital* dan *Good Corporate Governance* berpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap Nilai Perusahaan yang dimediasi oleh Kinerja Keuangan.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk menguji secara empiris

bahwa *Intellectual Capital* dan *Good Corporate Governance* berpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap Nilai Perusahaan yang dimediasi oleh Kinerja Keuangan.

TELAAH PUSTAKA

Agency Theory

Berkaitan dengan masalah keagenan, praktek pelaporan keuangan dalam organisasi sektor publik merupakan suatu konsep yang didasari oleh teori keagenan. Dalam pelaporan keuangan, pemerintah yang bertindak sebagai agen mempunyai kewajiban menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna informasi keuangan pemerintah yang bertindak sebagai prinsipal dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik serta baik secara langsung atau tidak langsung melalui wakil-wakilnya. Dalam suatu pemerintahan demokrasi, hubungan antara pemerintah dan para pengguna informasi keuangan pemerintah dapat digambarkan sebagai suatu hubungan keagenan (Faristina, 2011).

Kualitas Laporan Keuangan

Laporan keuangan yang dikatakan berkualitas apabila informasi yang disajikan didalam laporan keuangan dapat dipahami, bebas dari pengertian yang menyesatkan, menyajikan fakta secara jujur serta dapat mendukung pengambilan keputusan oleh para pemakai. serta dapat diandalkan, sehingga laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya. Namun demikian, perlu disadari bahwa laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin

dibutuhkan pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Karakteristik kualitatif laporan keuangan berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam penyampaian informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Empat karakteristik kualitatif tersebut diantaranya : Relevan, Andal, Dapat Dibandingkan dan Dapat dipahami.

Kompetensi Sumber Daya Manusia

Menurut Alimbudiono & Fidelis (2004), untuk menilai kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia dalam melaksanakan suatu fungsi, termasuk akuntansi, dapat dilihat dari *level of responsibility* dan kompetensi sumberdaya tersebut. Menurut Indriasari dan Nahartyo (2008), *skill* adalah kapasitas yang dibutuhkan untuk melaksanakan suatu rangkaian tugas yang berkembang dari hasil pelatihan dan pengalaman. Menurut Blanchard & Thacker (2004), *skill* seseorang tercermin dari seberapa baik seseorang dalam melaksanakan suatu kegiatan yang spesifik seperti mengoperasikan suatu peralatan, berkomunikasi efektif, atau mengimplementasikan suatu strategi bisnis.

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) adalah serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi

komputer (Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007).

Menurut Halim (2008:42) definisi akuntansi pemerintah daerah yang disebutkan sebagai Akuntansi Keuangan Daerah adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota atau provinsi) yang dijadikan informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak eksternal pemda (kabupaten, kota, / provinsi).

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

SPIP merupakan suatu langkah nyata pemerintah dalam memberikan acuan serta pijakan bagi pemerintah daerah agar pengelolaan keuangan dapat dilaksanakan secara akuntabel dan transparan. Wilkinson *et al.*, (2000) menyebutkan subkomponen dari aktivitas pengendalian yang berhubungan dengan pelaporan keuangan adalah (1) perancangan yang memadai dan penggunaan dokumen- dokumen dan catatan-catatan bernomor; (2) pemisahan tugas; (3) otorisasi yang memadai atas transaksi-transaksi; (4) pemeriksaan independen atas kinerja; dan (5) penilaian yang sesuai/tepat atas jumlah yang dicatat.

Kerangka Pemikiran

Pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

SDM merupakan *human capital* di dalam organisasi. *Human capital* merupakan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan seseorang yang dapat digunakan untuk menghasilkan layanan profesional dan *economic rent*. *Human*

capital merupakan sumber inovasi dan gagasan. Karyawan dengan *human capital* tinggi lebih memungkinkan untuk memberikan layanan yang konsisten dan berkompotensi tinggi (Sutaryo, 2011).

Penelitian Indriasari dan Nahartyo (2008), yang menemukan bukti empiris bahwa sumber daya manusia di sub bagian akuntansi/tata usaha keuangan yang ada di Kota Palembang dan Kabupaten Ogan Ilir diakui masih sangat kurang dari sisi jumlah maupun kualifikasinya. Dari sisi jumlah, beberapa satuan kerja yang ada hanya memiliki satu pegawai akuntansi, yaitu kepala sub bagian akuntansi/tata usaha keuangan. Sedangkan dari sisi kualifikasinya, sebagian besar pegawai sub bagian akuntansi/tata usaha keuangan tidak memiliki latar belakang pendidikan akuntansi. Uraian tugas dan fungsi sub bagian akuntansi/tata usaha keuangan yang ada juga masih terlalu umum (belum terspesifikasi dengan jelas).

Begitu juga dengan penelitian Tantri (2012) menemukan bukti empiris bahwa secara garis besar sumber daya manusia yang ada di instansi pemerintahan Kabupaten dan Kota Semarang belum berkompotensi, hal ini terbukti tidak ada satu pun laporan keuangan yang diterima Badan Pemeriksa Keuangan dengan predikat baik (Koran Tempo edisi 16 Januari 2009).

Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nurillah (2014) yang memberikan temuan empiris bahwa sumber daya manusia di sub bagian/tata usaha keuangan yang ada di Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya sudah mencukupi, baik dari sisi jumlah maupun kualifikasinya.

Pengaruh penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) terhadap kualitas laporan keuangan daerah

Pengelolaan keuangan daerah berarti mengurus dan mengatur keuangan daerah itu sendiri dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah menurut (Permendagri Nomor 13, 2006; 16-17) adalah sebagai berikut.: 1) Tertib, 2) Taat pada peraturan perundang-undangan, 3) Efektif, 4) Efisien, 5) Ekonomis, 6) Transparan, 7) Bertanggungjawab, 8) Keadilan, 9) Kepatutan, dan 10) Manfaat untuk masyarakat.

Keuangan daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan salah satu alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang luas nyata dan bertanggung jawab. Uraian ini menunjukkan bahwa keuangan daerah harus dikelola dengan baik agar semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kepentingan daerah. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 pasal 4 ayat (1) menyatakan keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

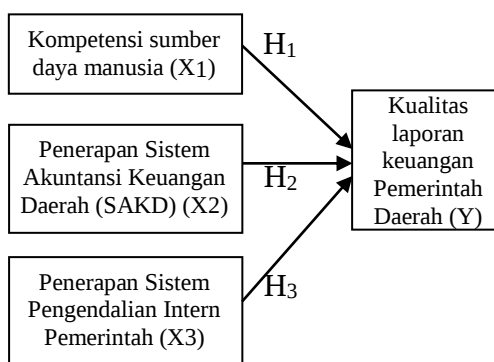
Pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

Masih ditemukannya penyimpangan dan kebocoran di dalam laporan

keuangan oleh BPK, menunjukkan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah belum memenuhi karakteristik/nilai informasi yang disyaratkan. Indriasari dan Nahartyo (2008) membuktikan secara empiris bahwa pengendalian internal akuntansi pemerintah daerah berpengaruh terhadap nilai laporan keuangan pemerintah daerah yang dinyatakan dengan ketepatanwaktuan dan keterandalan.

Sesuai dengan kerangka pemikiran diatas, maka model penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1
Model Penelitian



Sumber: Data Olahan, 2016

Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas dapat ditarik hipotesis yang dapat diuji sebagai berikut:

- H₁ : Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah
- H₂ : Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah
- H₃ : Sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah pengelola unit kerja atau pejabat struktural pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu. Adapun SKPD Kabupaten Indragiri Hulu yang berjumlah 29 SKPD. Dari setiap SKPD akan diambil 3 responden yaitu Kepala Dinas/Badan, Kepala Bagian Keuangan, dan Staf Keuangan Senior dengan kriteria masa kerja minimal 3 tahun. Sehingga jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 87 responden.

Jenis data yang digunakan adalah data primer. Teknik Pengumpulan Data dari kuesioner, dokumentasi dan studi pustaka. Definisi operasional variabel dalam penelitian ini yaitu:

1. Kualitas Laporan Keuangan

Menurut Halim (2008:89), laporan keuangan pemerintah daerah (pemda) terdiri atas laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Istilah "Laporan Keuangan Pemerintah Daerah" meliputi semua laporan dan berbagai penjelasannya yang mengakui laporannya tersebut akan diakui sebagai bagian dari laporan keuangan.

2. Kompetensi SDM

Kompetensi menurut Guy et al. (2002) adalah pengetahuan dan keahlian yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas. Variabel kompetensi sumber daya manusia diukur dengan 3 indikator yaitu: 1) Tanggungjawab; 2) Pelatihan; 3) Pengalaman

3. Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Badan Akuntansi Keuangan Negara (BAKUN) Departemen Keuangan RI (2001:1), Sistem

akuntansi keuangan secara sederhana adalah suatu sistem informasi yang menggabungkan proses pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran, pelaporan data yang berkaitan dengan keuangan dari suatu entitas sehingga dapat menghasilkan informasi keuangan yang dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Variabel penerapan sistem akuntansi keuangan diukur dengan 4 indikator yaitu: 1) Kesesuaian; 2) Prosedur Pencatatan; 3) Pembuatan Laporan Keuangan yang Dilaporkan Secara Periodik; 4) Laporan Keuangan Harus andal, Relevan, dapat dibandingkan dan Dapat Dipahami

4. Sistem Pengendalian Intern

Sistem Pengendalian Intern (SPI) merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi, serta berperan penting dalam pencegahan dan pendeteksian penggelapan (*fraud*). Variabel sistem pengendalian intern diukur dengan 5 indikator menurut COSO yaitu: 1) Lingkungan Pengendalian; 2) Penilaian Resiko; 3) Kegiatan Pengendalian; 4) Informasi dan Komunikasi; 5) Pemantauan

Model dalam penelitian ini adalah:

$$Y = a + b_1.X_1 + b_2.X_2 + b_3.X_3 + e$$

Keterangan :

Y = Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

a = Konstanta

b_{1-3} = koefisien regresi

X_1 = Kompetensi Sumber Daya Manusia

X_2 = Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)

X_3 = Sistem Pengendalian Intern

e = Error Term

Dalam penelitian ini digunakan alat bantu *computer* program SPSS

16.0. Untuk mendapatkan hasil yang akurat, maka sebelum melakukan analisis regresi berganda, terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Responden

Dari 87 buah kuesioner yang dikirim, terdapat sebanyak 9 kuesioner (10,34%) tidak dikembalikan artinya 78 kuesioner dikembalikan (89,66%). Sehingga banyaknya kuesioner yang dijadikan sampel dalam penelitian adalah 78 buah kuesioner.

Tabel 1
Karakteristik Responden

Kuesioner	Banyak	%
Jenis Kelamin Responden		
- Pria	43	55.13%
- Wanita	35	44.87%
Usia Responden		
- 21-30 tahun	4	5.13%
- 31-40 tahun	24	30.77%
- 41-50 tahun	19	24.36%
- Diatas 50 tahun	31	39.74%
Pendidikan Terakhir Responden		
- SMA	13	16.67%
- Diploma	5	6.41%
- S1	45	57.69%
- S2	15	19.23%
- S3	0	0.00%
Latar Belakang Pendidikan		
- Akuntansi	20	25.64%
- Manajemen	25	32.05%
- Pertanian	1	1.28%
- MIPA	0	0.00%
- Lain-lain	32	41.03%
Lama Bekerja		
- 1 - 5 tahun	29	37.18%
- 5 - 10 tahun	26	33.33%
- > 10 tahun	23	29.49%

Sumber : Data Olahan, 2016

Hasil Uji Statistik Deskriptif

Analisis deskriptif dilakukan untuk memberikan gambaran pada variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian.

Tabel 2
Analisis Statistik Deskriptif

Variabel	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
Kompetensi Sumber Daya Manusia	78	19.00	36.00	30.5769	3.61282
Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	78	24.00	45.00	35.4231	3.87305
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	78	29.00	44.00	37.1282	3.48786
Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	78	29.00	44.00	36.7051	3.78345
Valid N (listwise)	78				

Sumber : Data Olahan, 2016

Dari Tabel 2 didapatkan bahwa nilai mean untuk variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah 36,7051, dengan nilai minimum 29, serta nilai maksimum adalah 44 dan nilai standar deviasinya adalah 3,78345.

Variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia (X1) memiliki nilai mean 30,5769, dengan nilai minimum 19, serta nilai maksimum adalah 36 dan nilai standar deviasinya adalah 3,61282.

Variabel Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X2) memiliki nilai mean 35,4231, dengan nilai minimum 24, serta nilai maksimum adalah 45 dan nilai standar deviasinya adalah 3,87305.

Variabel Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (X3) memiliki nilai mean 37,1282, dengan nilai minimum 29, serta nilai maksimum adalah 44 dan nilai standar deviasinya adalah 3,48786.

Hasil Uji Kualitas Data

Hasil Uji Validitas

Pengujian validitas dilakukan dengan menggunakan metode Analisis korelasi. Perhitungan dilakukan dengan bantuan program SPSS. Jika nilai r hitung lebih besar dari r tabel maka pernyataan kuesioner

dinilai telah valid. Hasil pengujian menunjukkan bahwa semua pernyataan yang digunakan dalam penelitian ini mempunyai nilai korelasi yang lebih besar dari 0,2227. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa semua pernyataan tersebut adalah valid.

Uji Reliabilitas

Berikut hasil uji kualitas data:

Tabel 3
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach Alpha
Kompetensi Sumber Daya Manusia	0,707
Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	0,729
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	0,649
Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	0,739

Sumber : Data Olahan, 2016

Hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa semua variabel mempunyai koefisien Alpha yang cukup besar yaitu diatas 0,6 sehingga dapat dikatakan semua konsep pengukur masing-masing variabel dari kuesioner adalah reliabel yang berarti bahwa kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini merupakan kuesioner yang handal.

Hasil Uji Normalitas

Hasil pengujian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4
Hasil Uji Normalitas

	Unstandardized Residual
N	78
Normal Parameters ^{a,b}	
Mean	.0000000
Std. Deviation	2.87855873
Most Extreme Differences	.079
Absolute	.045
Positive	-.079
Negative	.701
Kolmogorov-Smirnov Z	.709
Asymp. Sig. (2-tailed)	

Sumber : Data Olahan, 2016

Tabel 4 menunjukkan nilai Asymp. Sig 0,709 > 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa data variabel penelitian ini telah terdistribusi secara normal.

Hasil Uji Asumsi Klasik

Hasil Uji Multikolinearitas

Berikut hasil uji multikolinieritas:

Tabel 5

Hasil Uji Multikolinerineritas

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Kompetensi Sumber Daya Manusia	.756	1.323
	Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	.762	1.313
	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	.990	1.010

Sumber : Data Olahan, 2016

Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa semua nilai VIF dari variabel bebas memiliki nilai yang lebih kecil dari 10. Hasil pengujian model regresi tersebut menunjukkan tidak adanya gejala multikolinier dalam model regresi. Hal ini berarti bahwa semua variabel bebas tersebut layak digunakan sebagai prediktor.

Hasil Uji Autokorelasi

Hasil pengujian autokorelasi dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 6

Hasil Uji Autokorelasi

Model	Durbin-Watson
1	1.730

Sumber : Data Olahan, 2016

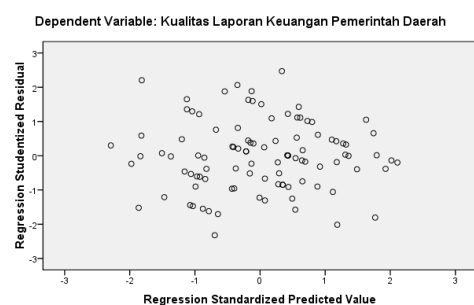
Berdasarkan analisis regresi diperoleh nilai Durbin Watson sebesar 1,730 dengan jumlah data sebanyak 78 dan variabel yang mempengaruhi sebanyak 3 variabel, maka dari tabel Durbin Watson

diperoleh $du=1,7129$. Jadi, $du < d$ hitung $< 4 - du = 1,7129 < 1,730 < 2,2871$. Hasil yang diperoleh sesuai dengan kriteria Durbin Watson tes, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada autokorelasi.

Hasil Uji Heterokedastisitas

Berikut ini hasil uji heteroskedastisitas:

Gambar 2
Grafik Scatterplot



Sumber : Data Olahan, 2016

Gambar uji scatterplot diatas menjelaskan bahwa data tersebar baik berada di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini menunjukkan tidak terdapat heteroskedastisitas dalam model regresi yang digunakan.

Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Hasil pengujian model regresi secara parsial diperoleh sebagai berikut ini:

Tabel 7

Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
	B	Std. Error	Beta
1 (Constant)	6.141	4.753	
Kompetensi Sumber Daya Manusia	.407	.107	.389
Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	.306	.099	.313
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	.196	.096	.181

Sumber : Data Olahan, 2016

Persamaan regresi diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

$$Y = 6,141 + 0,407X_1 + 0,306X_2 + 0,196X_3$$

1. Konstanta (a) = 6,141 merupakan nilai konstanta, jika nilai variabel independen (X) bernilai nol, maka Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y) bernilai sebesar 6,141.
2. Koefisien regresi (b₁) = 0,407, jika variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia (X₁) ditingkatkan 1 satuan maka Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y) akan meningkat sebesar 0,407.
3. Koefisien regresi (b₂) = 0,306, jika variabel Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X₂) ditingkatkan 1 satuan maka Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y) akan meningkat sebesar 0,306.
4. Koefisien regresi (b₃) = 0,196, jika variabel Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (X₃) ditingkatkan 1 satuan maka Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y) akan meningkat sebesar 0,196 dengan.

Hasil Uji Hipotesis

Hasil pengujian signifikansi variabel bebas secara parsial adalah sebagai berikut:

Tabel 8
Hasil Uji Hipotesis

Model	t	Sig.
1 (Constant)	1.292	.200
Kompetensi Sumber Daya Manusia	3.821	.000
Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	3.092	.003
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	2.032	.046

Sumber : Data Olahan, 2016

Hasil Uji Hipotesis

Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Dari hasil perhitungan Tabel 8, Kompetensi Sumber Daya Manusia (X₁) yang menghasilkan nilai nilai $t_{hitung} = 3,821$ dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Karena $t_{hitung} 3,821 > t_{tabel} 1,99254$ dan nilai signifikansi (*p-value*) sebesar $0,000 < 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia (X₁) berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Berdasarkan hasil uji regresi linier berganda pada Tabel 8, diperoleh nilai koefisien regresi (b₁) = 0,407, jika variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia (X₁) ditingkatkan 1 satuan maka Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y) akan bertambah sebesar 0,407 dengan asumsi variabel independen lainnya bernilai tetap.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Indriasari dan Nahartyo (2008) yang membuktikan bahwa terdapat pengaruh signifikan positif kompetensi sumber daya manusia dengan kualitas LKPD.

Menurut Devi (2011), laporan keuangan merupakan sebuah produk yang dihasilkan oleh bidang atau disiplin ilmu akuntansi. Untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkompetensi, maka Kompetensi Sumber Daya Manusia yang melaksanakan sistem akuntansi sangatlah penting. Begitu juga di entitas pemerintahan, untuk menghasilkan Laporan Keuangan Daerah yang berkompetensi dibutuhkan SDM yang memahami dan kompeten dalam Akuntansi pemerintahan, keuangan daerah

bahkan organisasional tentang pemerintahan.

Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Dari hasil perhitungan Tabel 8, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X_2) yang menghasilkan nilai $t_{hitung} = 3,092$ dengan nilai signifikansi ($p-value$) sebesar 0,003. Karena $t_{hitung} 3,092 > t_{tabel} 1,99254$ dan nilai signifikansi ($p-value$) sebesar $0,003 < 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X_2) berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Berdasarkan hasil uji regresi linier berganda pada Tabel 8, diperoleh nilai koefisien regresi (b_2) = 0,306, jika variabel Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X_2) ditingkatkan 1 satuan maka Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y) akan bertambah sebesar 0,306 dengan asumsi variabel independen lainnya bernilai tetap.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Roviyantje (2011) yang membuktikan bahwa terdapat pengaruh signifikan positif Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dengan kualitas LKPD.

Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berdasarkan standar akuntansi pemerintahan adalah bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan keandalan pengelola keuangan pemerintah melalui penyusunan dan pengembangan standar akuntansi pemerintah. Pengelolaan keuangan daerah berarti mengurus dan mengatur keuangan daerah itu sendiri dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah menurut (Permendagri Nomor 13,

2006; 16-17). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan salah satu alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang luas nyata dan bertanggung jawab. Uraian ini menunjukkan bahwa keuangan daerah harus dikelola dengan baik agar semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kepentingan daerah. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 pasal 4 ayat (1) menyatakan keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Dari hasil perhitungan Tabel 8, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (X_3) yang menghasilkan nilai $t_{hitung} = 2,032$ dengan nilai signifikansi ($p-value$) sebesar 0,046. Karena $t_{hitung} 2,032 > t_{tabel} 1,99254$ dan nilai signifikansi ($p-value$) sebesar $0,046 < 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (X_3) berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Berdasarkan hasil uji regresi linier berganda pada Tabel 8, diperoleh nilai koefisien regresi (b_3) = 0,196, jika variabel Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (X_3) ditingkatkan 1 satuan maka Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y) akan bertambah sebesar

0,196 dengan asumsi variabel independen lainnya bernilai tetap.

Penelitian mengenai pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap kualitas LKPD telah dilakukan oleh Arifianti (2011). Arifianti (2011) membuktikan bahwa terdapat pengaruh signifikan positif Sistem Pengendalian Intern terhadap kualitas LKPD.

Didalam Konsep Standar Pemeriksaan Keuangan Negara tentang Standar Pekerjaan Lapangan Pemeriksaan Keuangan mengenai Pengendalian Intern disebutkan bahwa sistem informasi yang relevan dengan tujuan laporan keuangan, salah satunya adalah sistem akuntansi yang terdiri dari metode dan catatan yang dibangun untuk mencatat, mengolah, mengikhtisarkan dan melaporkan transaksi entitas (baik peristiwa maupun kondisi) untuk memelihara akuntabilitas bagi aktiva, utang dan ekuitas yang bersangkutan (BPK RI, 2006). Sistem akuntansi berkembang sangat pesat sehingga sebagai suatu informasi, membutuhkan manusia untuk menjalankan sistem yang ada untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

Koefisien Determinasi (R^2)

Berikut ini merupakan hasil pengujian koefisien determinasi :

Tabel 9
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.649 ^a	.421	.398	2.93633

Sumber : Data Olahan, 2016

Koefisien determinasi digunakan untuk menguji *goodness-fit* dari model regresi. Dari tampilan output SPSS menunjukkan besarnya

Adjusted R² model regresi adalah 0,398. Hal ini berarti bahwa peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dipengaruhi oleh faktor Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebesar 39,8% dan sisanya yaitu sebesar 60,2% dipengaruhi variabel-variabel lainnya.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Artinya, semakin baik Kompetensi Sumber Daya Manusia, maka akan meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- 2) Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Artinya, semakin baik Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, akan meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- 3) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Artinya, semakin baik Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang dijalankan oleh SKPD, akan meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Saran

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan penelitian, maka saran yang dapat diberikan adalah:

- 1) Sebaiknya peneliti selanjutnya menggunakan sampel yang lebih besar lagi dari jumlah sampel yang dipakai dalam penelitian ini.
- 2) Sebaiknya peneliti selanjutnya menambah variabel lain yang bisa mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah seperti komitmen organisasi, pengawasan keuangan, dukungan pimpinan dan alat, fasilitas dan organisasi tim.

DAFTAR PUSTAKA

- Alimbudiono, Ria Sandra & Fidelis Arastyo Andono. 2004. *Kesiapan Sumber Daya Manusia Sub Bagian Akuntansi Pemerintah Daerah "XYZ" dan Kaitannya Dengan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kepada Masyarakat: Renungan Bagi Akuntan Pendidik*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik. Vol. 05 No. 02. Hal. 18-30.
- Badan Akuntansi Keuangan Negara (BAKUN) Departemen Keuangan RI (2001)
- Badan Pemeriksa Keuangan. 2015. *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2014*. Jakarta: BPK RI.
- Blanchard, P. Nick & Thacker, James W, *Effective Training*, Pearson Prentice Hall, New
- Guy et al. 2002. *Auditing* Jilid 1. Edisi Kelima. Jakarta: Erlangga.
- Halim, Abdul. 2008. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Ihsanti, Emilda. 2014. *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah*. Padang: Universitas Negeri Padang
- Indriasari, Desi dan Ertambang Nahartyo, 2008 *Pengaruh kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern akuntansi terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah (studi pada pemerintah kota Palembang dan kabupaten ogan ilir)* SNA XI Pontianak.
- Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian intern Pemerintah (SPIP)
- Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- Sudiarianti, Ni Made, I Gusti Ketut Agung Ulupui dan I G.A. Budiasih. 2015. *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Pada Penerapan Sistem gendalian Intern Pemerintah Dan Standar Akuntansi Pemerintah Serta Implikasinya Pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Simposium Nasional Akuntansi 18 Universitas Sumatera Utara, Medan 16-19 September 2015
- Sutaryo. 2011. *Manajemen Aset Daerah*. Jurnal Akuntansi. Vol 1. No 2,. November 2011.
- Tantri, Rahajaan, dkk. 2012. *Kajian implementasi penerapan badan layanan Umum Di RSUP dr. Wahidin Sudirhusodo*

Makassar. Universitas
Hasanuddin

www.bpk.go.id

Wilkinson, W. Joseph, Michael J. Cerullo, Vasant Raval, & Bernard Wong-On-Wing. 2000. *Accounting Information Systems: Essential Concepts and Applications*. Fourth Edition. John Wiley and Sons. Inc.

Yensi, Sefri, Dr. H. Amir, dan Yuneita Anisma. 2014. *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Dan Sistem Pengendalian Intern (Internal Audit) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi*

Empiris pada SKPD Kabupaten Kuantan Singingi). JOM FEKON Vol. 1 No. Oktober 2014.

Zuliarti. 2012. *Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah: Studi Pada Pemerintah Kabupaten Kudus*. Skripsi. Fakultas Ekonomi, Universitas Muria Kudus.